



Resistensi Perempuan Iran terhadap Kebijakan Wajib Berhijab: Studi Perbandingan dengan Pelarangan Hijab di Tajikistan

Najla Dara Ayunda^{1*}, Marsya Zusrieka², Chifra Zeila Pramesyanti³, Muhamad Kahar Mudzakar Ramzy Sarman⁴, Nurdin⁵

1,2,3,4,5 Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

DOI:

<https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2678>

*Correspondence: Najla Dara Ayunda

Email:

2310413170@mahasiswa.upnvj.ac.id

Received: 08-04-2025

Accepted: 19-05-2025

Published: 30-06-2025



Copyright: © 2024 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license

(<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa kebijakan di kedua negara tersebut merupakan hasil manifestasi kontrol politik atas perempuan yang mencerminkan konflik dari hak kebebasan individu atas tubuhnya sendiri. implikasi dari penelitian ini dapat menjadi acuan bagi pembuat kebijakan agar disusun secara transparan dan melibatkan masyarakat, Serta memastikan kebijakan tersebut tidak mencederai hak kebebasan berekspresi. Penulis memberikan saran kepada penelitian selanjutnya untuk lebih mendalami kembali literatur dan juga media online untuk mengikuti terus perkembangan dari kebijakan serta gerakan resistensi di kedua negara.

Kata Kunci: Resistensi Perempuan, Kebijakan wajib Hijab, Kebijakan Pelarangan Hijab, Iran, Tajikistan.

Abstract: This research studied the policy on the use of hijab in Iran and Tajikistan and the response of women to the issuance of the policy. This comparative study used qualitative approach taken from secondary data. It aimed to understand the socio-cultural dynamics and forms of resistance as a result of state intervention on women's bodies. From the results of the study, Iran requires the use of hijab as a form of implementing Islamic ideology after the 1979 revolution. However, Tajikistan, a country with a Muslim majority prohibits the use of hijab as a pretext for maintaining national cultural values and building a secular national identity. With the imposition of administrative sanctions and restrictions on going to public areas for hijab users. The two countries showed similarities in policies on clothing which are used as state control tool over women's bodies. The mandatory and restrictive policies triggered responses from women from both countries triggered out resistance movements from protests in public like "White Wednesday" movement to protests in digital spaces like "My Stealthy Freedom" movement. As Conclusion, the policies in both countries are the result of the manifestation of political control over women which reflects the conflict of individual freedom rights over their own bodies. It can be a reference for policy makers to be transparent and involve the community, also ensuring that the policy

does not harm the right to freedom of expression. The author suggested to explore more literatures keep being updated about the development of policies and resistance.

Keywords: *Women's Resistance, Mandatory Hijab Policy, Hijab Ban Policy, Iran, Tajikistan.*

Pendahuluan

Negara Iran adalah negara yang terletak di Asia Barat, Iran dipandang sebagai kekuatan regional yang mempunyai pengaruh di Teluk Persia dan Timur Tengah. Iran mempunyai kemampuan untuk dapat bisa mempengaruhi perkembangan geopolitik di kawasan dan sekitarnya, karena didukung oleh kuat di bidang ekonomi, posisi geografis, dan sumber daya alamnya, khususnya minyak dan gas (Saikal, A., 2020). Iran merupakan sebuah republik Islam yang berdiri setelah Revolusi Islam tahun 1979. Pada sistem politiknya menyatukan prinsip-prinsip Islam dan demokrasi, dengan Pemimpin Tertinggi sebagai otoritas tertinggi negara (Todorova, B., 2020). Sejak Revolusi Islam 1979, Iran menerapkan kewajiban berhijab bagi perempuan disana, yang dimana hal itu sebelumnya tidak diwajibkan di bawah rezim Shah Pahlavi. Dengan adanya kebijakan ini merubah hidup masyarakat Iran khususnya perempuan mengekspresikan dirinya dalam berpakaian sebebaskan-bebasnya (Mohammadi, O., 2016). Kebijakan wajib berhijab ini atas perintah Ayatollah Ali Khomeini, kebijakan ini awalnya hanya sekedar aturan untuk para pekerja wanita di kantor-kantor pemerintahan Iran pada Juli 1980, tetapi kemudian menjadi undang-undang wajib bagi semua wanita di depan umum pada April 1983 (Kahalzadeh, H., 2024).

Meskipun hijab menjadi salah satu pakaian yang wajib dikenakan perempuan di Iran, banyak perempuan Iran memodifikasi cara berpakaian mereka sebagai suatu bentuk ekspresi diri dan protes terhadap kebijakan negara (Rashid, A., 2023). Kebijakan wajib berhijab ini juga menimbulkan kekacauan besar bagi Iran karena kematian salah satu perempuan Iran yaitu Mahsa Jina Amini. Diduga Mahsa melakukan pelanggaran terhadap penggunaan hijab, Mahsa ditangkap oleh polisi moral, sejak itulah ia jatuh sakit dan akhirnya meninggal dunia (Al Mustofa, S. A., & Kashmir, F. (2024). Maka dari itulah Iran mendapatkan protes besar-besaran dari seluruh masyarakatnya, aksi protes besar inilah yang membuat Iran merespon warganya dengan cara memblokir akses internet di Teheran dan Kurdistan serta memblokir sosial media seperti WhatsApp dan Instagram sebagai upaya penghentian protes demonstrasi warganya (Rony, 2022). Sejak saat kematian Mahsa tidak jarang para perempuan Iran sudah tidak mengikuti aturan wajib negaranya tersebut sebagai bentuk perlawanan, meskipun para pejabat Iran enggan untuk mengubah kebijakan wajib hijab tersebut (Al Mustofa, S. A., & Kashmir, F. (2024).

Lain halnya dengan negara Tajikistan yang melarang warganya untuk mengenakan hijab. Tajikistan merupakan negara yang berada di Asia Tengah dan merupakan sebuah negara yang menganut sistem republik presidensial yang dimana sebagai pegang kekuasaan yang utama. Presiden Emomali Rahmon adalah presiden yang menjabat sejak 1994 dan telah menghapus batasan masa jabatan presiden untuk dirinya sendiri (Eicher, S., 2019). Negara Tajikistan dengan 96% penduduknya beragama Islam dan berpenduduk sekitar 10 juta jiwa, Tajikistan memberlakukan kebijakan larangan untuk memakai hijab,

pemerintah mengesahkan kebijakan itu pada bulan Juni 2024 lalu yang memang mengejutkan mayoritas warganya yang beragama Islam. Kebijakan disetujui oleh majelis tinggi parlemen Majlisi Mili, yang melarang penggunaan “pakaian asing” termasuk hijab, ataupun penutup kepala yang dikenakan oleh perempuan disana. Warga Tajikistan disarankan untuk memakai pakaian adat khas Tajikistan. Kebijakan tersebut bukan hal yang tidak serius, melainkan jika penduduk Tajikistan melanggarnya maka dikenakan denda berupa sejumlah uang (Mustaqim, A. H., 2024). Dengan munculnya kebijakan ini dianggap sebagai cerminan dari garis politik yang dijalani oleh pemerintahan Emomali Rahmon sebagai presiden seumur hidup Tajikistan (Yulianingsih, T., 2024).

Tajikistan memang menjadi negara yang melakukan pembatasan ekstrem untuk para warganya. Mereka melakukan pembatasan kebebasan dalam beragama, berekspresi serta para pejabat pemerintah kebal akan hukum negaranya sendiri, banyak kasus pelanggaran HAM di negara tersebut yang tidak diproses secara hukum (United States Department of State, 2011). Tajikistan memberlakukan peraturan yang ketat terhadap pendidikan agama, pelaksanaan ibadah, larangan praktek keagamaan di ruang publik bagi anak dibawah usia 18 tahun dan melakukan diskriminasi terhadap simbol-simbol keagamaan seperti hijab dan jenggot. Tajikistan terus-menerus membatasi hak-hak masyarakatnya dalam beragama dengan alasan untuk memajukan “identitas sekuler” “melindungi nilai-nilai budaya nasional” dan “mencegah tahayul dan ekstremisme” (United States Department of State, 2019). Tindakan ini sebagai upaya pemerintah untuk menghentikan budaya Tajikistan dan kebebasan beragama di Tajikistan, ribuan pria dipenjarakan dikarenakan tingkah lakunya yang asing dan tidak sesuai dengan budaya Tajikistan (Ariesta, M., 2024).

Penelitian ini memakai studi literatur sebagai acuan penelitian yaitu, penelitian oleh Nabilah Wafa Wijayanto dan Roma Ulinuha (2022) menunjukkan bahwa perempuan Iran menolak kebijakan wajib berhijab yang diberlakukan sejak Revolusi Islam dan berlanjut pada era Hassan Rouhani, dengan menggunakan pendekatan feminisme Fatima Mernissi yang melihat hijab sebagai konstruksi sosial patriarkal, serta memanfaatkan media sosial dalam gerakan “My Stealthy Freedom” sebagai bentuk perjuangan HAM dan kebebasan individu. Penelitian oleh Syifa Aulia Al Mustofa dan Fadhilla Kashmir (2024) memperkuat hal tersebut dengan mengungkapkan bahwa kematian Mahsa Amini akibat tindakan represif polisi moral menjadi katalisator bagi gerakan sosial perempuan yang lebih vokal dalam menuntut kesetaraan dan mengkritik diskriminasi gender. Sementara itu, laporan Departemen Luar Negeri AS tahun 2011 dan 2019 tentang Tajikistan menyoroti pelanggaran HAM serius, termasuk penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, dan pembatasan kebebasan beragama secara ketat, termasuk pelarangan simbol-simbol keagamaan seperti hijab. Kontras antara Iran dan Tajikistan terletak pada posisi hijab: di Iran menjadi simbol kontrol negara sekaligus perlawanan rakyat, sedangkan di Tajikistan justru ditekan dan dihapuskan oleh negara demi menjaga identitas sekuler. Dengan adanya penelitian terdahulu sebagai acuan maka dapat membedakan dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu ingin mengkaji lebih dalam mengenai perbedaan dua negara yang bertolak belakang,

Iran dengan kebijakan wajib berhijabnya serta Tajikistan dengan kebijakan pelarangan berhijab di negaranya.

Penelitian ini bertujuan mengkaji penerapan kebijakan hijab di Iran dan Tajikistan serta memahami bagaimana faktor sosial, budaya, dan hak asasi manusia memengaruhi respons perempuan terhadap kebijakan tersebut. Penelitian ini membahas penerapan kebijakan wajib hijab di Iran dan pelarangan hijab di Tajikistan, yang merepresentasikan dua pendekatan ekstrem terhadap simbol keagamaan. Di Iran, hijab diwajibkan sebagai bagian dari ideologi negara, sementara di Tajikistan dilarang demi menjaga identitas sekuler. Respons masyarakat, khususnya perempuan, dipengaruhi oleh dinamika sosial, budaya, dan kondisi hak asasi manusia di masing-masing negara. Perempuan Iran menunjukkan resistensi melalui gerakan sosial, sedangkan di Tajikistan ruang perlawanan terbatas karena kontrol negara yang ketat. Maka dari itu hal tersebut yang menjadikan latar belakang penulis melakukan penelitian lebih lanjut.

Metodologi

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif serta metode yang digunakan adalah studi komparatif. Kualitatif bertujuan untuk mendapatkan wawasan yang mendalam dari suatu fenomena dengan menelaah gejala dan makna yang tersembunyi dibalik masalah, kemudian di dapatilah sebuah kesimpulan sesuai dengan konteks dari penelitiannya (Harahap, N., 2020). Pendekatan tersebut dipilih karena tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami dan menjelaskan fenomena sosial dari bentuk resistensi yang terjadi karena adanya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hijab di kedua negara.

Studi komparatif (Comparative Study) dipilih dalam penelitian ini karena metode tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana perbedaan variabel antara dua kelompok yang berbeda (Wahyudi, A., & Yulianti, Y., 2021). dalam konteks ini, penelitian dengan studi komparatif mencari persamaan dan perbedaan dalam kebijakan oleh pemerintah serta strategi resistensi dalam merespon sebuah kebijakan di negara Iran dan Tajikistan. Dengan dilakukannya perbandingan, peneliti berusaha untuk menggali bagaimana kedua negara tersebut dalam sisi kebijakan pelarangan hijab dan bentuk perlawanan di kedua negara tersebut.

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber dari informasinya, dimana data sekunder diperoleh tidak langsung dari sumber utama, namun melalui perantara atau sumber lain yang telah mengolahnya terlebih dahulu (Jabnabillah, F., et al., 2023). Pada konteks penelitian ini, data sekunder dapat berupa Jurnal Ilmiah yang membahas tentang politik identitas dan gerakan resistensi serta media online yang melaporkan fenomena di kedua negara. Data sekunder memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi perbandingan negara yang wajib mengenakan hijab dengan negara yang melarang adanya penggunaan hijab serta bentuk dari resistensinya.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Kebijakan Hijab di Iran dan Tajikistan

Iran dikenal sebagai negeri para *Mullah* atau Ulama dikarenakan, pasca Revolusi Islam negara Iran mengganti negaranya menjadi Republik Islam dengan sistem *Wilāyat al-Faqīh*, yang dimana menerapkan sistem kehadiran wakil Tuhan, sehingga segala sesuatu yang bersumber pada ulama adalah sesuatu yang mutlak. Maka dari itu pemegang peranan penting dalam kehidupan sosial dan negara dipegang oleh para ulama (Usman, U., 2017). Ayatollah Khomeini disahkan sebagai *Wilāyat al-Faqīh, marja taqlid* yang terkenal dan juga sebagai pemimpin revolusi Islam Iran. Persoalan kebijakan wajib berhijab di Iran memang terjadi pasang surut lantaran mengikuti aturan yang ditetapkan oleh setiap orang yang akan memimpin negara Iran (Wijayanto, N. W., & Ulinnuha, R., 2022).

Sejak 11 Februari 1979 menjadi tanggal kemenangan Ayatollah Khomeini dan merubah sistem pemerintahan Iran. Pasca revolusi Islam Iran di tahun 1979, kebijakan mengenai hijab kembali dibuat, setelah sempat dihilangkan pada era kepemimpinan Reza Shah Pahlevi tahun 1920-an. Sebelum Revolusi Islam, di bawah pemerintahan Shah Mohammad Reza Pahlavi, terdapat periode Westernisasi yang signifikan, di mana jilbab tidak diwajibkan, dan bahkan sempat dilarang di tempat-tempat umum tertentu pada masa Reza Shah di awal abad ke-20. Di tahun 1979 perempuan diwajibkan untuk menutupi tubuh mereka terkecuali bagian wajah dan telapak tangan. Ayatollah Khomeini sendiri mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa perempuan harus mengenakan jilbab karena melanggar hukum Islam untuk tidak melakukannya. Hukum ini ditegakkan melalui Pasal 638 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Islam Iran, yang menyatakan bahwa "perempuan yang tampil di depan umum tanpa hijab syariah akan dijatuhi hukuman penjara sepuluh hari hingga dua bulan, atau denda 50.000 hingga 500.000 Rial (Amnesty, 2024). Dengan adanya aturan tersebut tentunya mendapat kecaman dari para perempuan di Iran, tidak sedikit dari mereka akhirnya meninggalkan negara Iran karena tidak sanggup dengan adanya aturan tersebut pada era Rezim Khomeini (Wijayanto, N. W., & Ulinnuha, R., 2022). Kebijakan wajib hijab ini tidak sedikit juga wanita Iran yang terjerumus ke penjara dan menjalani hukuman yang berat lantaran membuka cadarnya di jalan atau menyatakan bahwa mereka menolak kebijakan wajib hijab tersebut (Al Mustofa, S. A, Kashmir, F., 2024). Sayangnya, dikarenakan pelaksanaan kebijakan ini yang terlalu ketat sampai-sampai menyebabkan korban jiwa seperti kasus Mahsa Amini, yang dikenal telah dibunuh selam proses penangkapan oleh polisi moralitas dikarenakan tidak benar dalam menggunakan hijab, dengan adanya kejadian tersebut memunculkan kemarahan para perempuan Iran. Pada tanggal 13 September 2022 beberapa perempuan Iran dengan berani menolak untuk tidak mengenakan hijab di depan muka umum (Oktavian, Z.M. & Saifuddin, S., 2023).

Sementara, penerapan kebijakan hijab di Tajikistan merupakan salah satu topik yang paling banyak diperdebatkan di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam ini, dimana hampir 96% dari 10,3 juta warganya menganut agama Islam (CNN Indonesia, 2024). Pada bulan Juni 2024, sebuah undang-undang yang disahkan oleh pemerintah Tajikistan secara resmi melarang penggunaan hijab dan pakaian keagamaan lainnya. Larangan ini tidak hanya berlaku di institusi pendidikan dan tempat bekerja, tetapi juga di ruang publik, yang mencakup hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari (CNBC Indonesia, 2024). Kebijakan ini bermula pada tahun 2007, ketika pemerintah mulai melakukan tindakan keras

terhadap pemakaian hijab di institusi publik yang kemudian berujung pada penggerebakan di pasar dan penutupan toko-toko yang menjual jilbab. Pada tahun 2015, hampir 160 toko hijab ditutup, dan lebih dari 1.700 wanita dibujuk untuk berhenti menggunakan hijab (Permana, F. E., & Zamzani, F, 2024). Pada tahun 2018, Kementerian Kebudayaan menerbitkan buku panduan setebal 376 halaman yang merincikan pakaian yang pantas dan tidak pantas bagi wanita Tajikistan, termasuk larangan terhadap gaun hitam dan hijab. Buku ini juga memberikan rekomendasi pakaian yang pantas berdasarkan usia dan acara, seperti bekerja, liburan, atau kumpul keluarga (Rahmanda, S. K., & Luthfiana, H, 2024).

Pemerintah Tajikistan menyebut kebijakan ini adalah untuk melindungi nilai-nilai budaya nasional dan mencegah pengaruh asing serta ekstremisme keagamaan (CNN Indonesia, 2024). Presiden Emomali Rahmon secara terbuka tidak menyetujui hijab sebagai pakaian asing dan menekankan perlunya mengenakan pakaian tradisional Tajikistan, bahkan selama masa berkabung warna hitam ini diganti oleh warna putih atau biru, sesuai dengan adat istiadat setempat (Permana, F. E., & Zamzami, F, 2024). Pemerintah juga secara aktif berkomunikasi dengan masyarakat, baik melalui media atau pesan singkat di ponsel, untuk mendorong mereka agar mengenakan pakaian tradisional dan menjauhi pakaian yang dianggap bukan bagian dari identitas Tajikistan (Permana, F. E., & Zamzami, F, 2024). Penegakan larangan ini diatur dengan sanksi administratif, berupa denda yang cukup besar. Pelanggar aturan ini dapat dikenakan sanksi hingga 7,920 somoni, (sekitar 12 juta rupiah), sementara pejabat pemerintah dan tokoh agama yang melanggarnya dapat menghadapi sanksi yang lebih berat, mulai dari 54.000 hingga 57.600 somoni (sekitar 82,6 hingga 88 juta rupiah) (detikNews, 2024). Selain itu, perusahaan yang memperbolehkan karyawan perempuannya menggunakan hijab juga akan dikenakan denda yang besar (Permana, F. E., & Zamzami, F, 2024).

Kebijakan ini menuai pro dan kontra di masyarakat. Banyak perempuan merasa kurang bebas, dimana terpaksa memilih antara profesi dan keyakinan agama yang mereka jalankan, seperti yang dirasakan oleh Salomat, seorang lulusan kedokteran yang terpaksa bekerja di salon karena tidak bisa menggunakan hijab di rumah sakit (CNN Indonesia, 2024). Opini publik juga banyak mengkritik pemerintah, karena menganggap pemerintah lebih memperhatikan cara berpakaian dibandingkan menyelesaikan masalah ekonomi dan sosial yang seharusnya menjadi prioritas mereka (Anjani, R, 2025). Secara keseluruhan, penerapan kebijakan hijab di Tajikistan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mensosialisasikan identitas nasional dan meminimalkan dampak agama di ruang publik. Namun, hal ini bertentangan dengan keinginan sebagian besar masyarakat Muslim dan telah memicu kecaman baik di dalam negeri maupun internasional.

Respons Perempuan dan Dinamika Sosial-Budaya di Iran dan Tajikistan

Kebijakan wajib berhijab di Iran resmi diberlakukan sejak 7 Maret 1979 setelah Revolusi Islam yang menggulingkan rezim Shah dan menggantinya dengan pemerintahan teokratis yang dipimpin oleh Ayatollah Khomeini. Kebijakan ini menjadi simbol penegakan nilai-nilai keislaman yang ketat, di mana perempuan diwajibkan menutup aurat dengan hijab tanpa toleransi (Wijayanto, N. W., & Ulinuha, R., 2022). Namun, kebijakan ini

memicu resistensi yang signifikan dari perempuan Iran. Demonstrasi penolakan terjadi sehari setelah kebijakan diumumkan, dan sejak itu perempuan Iran melakukan berbagai bentuk perlawanan, termasuk aksi melepas hijab secara terbuka, protes di jalanan, hingga kampanye di media sosial. Gerakan ini dipandang sebagai perjuangan feminis yang menolak dominasi patriarki yang diwujudkan melalui pemaksaan hijab. Perspektif feminis Fatima Mernissi digunakan untuk menganalisis fenomena ini, yang melihat hijab sebagai konstruksi sosial yang mencerminkan dominasi laki-laki atas perempuan (Wijayanto, N. W., & Ulinuha, R., 2022). Penindakan oleh polisi moral terhadap perempuan yang melanggar aturan hijab sangat keras, termasuk penahanan, denda, bahkan hukuman cambuk. Kasus kematian Mahsa Amini saat ditahan polisi moral memicu gelombang protes besar-besaran, yang menandai puncak resistensi perempuan Iran terhadap kebijakan ini. Gerakan sosial perempuan Iran menuntut kebebasan memilih pakaian dan menolak intervensi negara atas tubuh mereka, serta menuntut reformasi hak-hak perempuan secara lebih luas (Al Mustofa, S. A., & Kashmir, F., 2024).

Selain menjadi simbol penegakan syariat, kebijakan wajib hijab di Iran juga telah menjadi sumber ketegangan sosial-politik yang berkepanjangan. Sejak diberlakukan, aturan ini tidak hanya berlaku bagi muslimah, tetapi juga perempuan non-Muslim, dengan ancaman hukuman penjara, denda, bahkan cambuk bagi pelanggarnya (Wirayudha, R., 2022). Penolakan terhadap kebijakan ini tidak hanya terjadi di jalanan, tetapi juga di ruang-ruang digital, di mana perempuan Iran memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan protes dan membangun solidaritas. Aksi-aksi seperti melepas hijab di ruang publik dan memanjat fasilitas umum sambil melambaikan hijab menjadi simbol perlawanan yang kuat terhadap negara. Skala perlawanan publik yang terjadi pasca kematian Mahsa Amini disebut sebagai yang terbesar dalam sejarah Republik Islam Iran, memperlihatkan bahwa gerakan perempuan di Iran telah bertransformasi menjadi kekuatan sosial yang menuntut demokrasi dan kesetaraan gender secara lebih luas (Sihite, E., & Longdong, N., 2022).

Berbeda dengan Iran yang mewajibkan hijab, Tajikistan menerapkan kebijakan pelarangan hijab, terutama sejak era Soviet dan berlanjut hingga kini sebagai bagian dari kebijakan yang ketat. Pemerintah Tajikistan melarang penggunaan hijab dan pakaian Islami lain di ruang publik dengan alasan menjaga nilai budaya nasional dan mencegah ekstremisme agama. Respons perempuan di Tajikistan terhadap pelarangan ini cenderung lebih terbatas karena tekanan politik dan hukum yang ketat. Aktivis dan perempuan Muslim melihat pelarangan hijab sebagai bentuk penindasan terhadap kebebasan beragama dan ekspresi identitas Islam mereka. Menurut aktivis seperti Muhammad Mansur, pelarangan hijab merupakan kelanjutan kebijakan negara yang menyekulerkan masyarakat dan membatasi kebebasan beragama. Meskipun ada sanksi berat, banyak perempuan tetap berusaha mempertahankan pilihan berhijab sebagai ekspresi keyakinan dan identitas budaya mereka (Wijayanto, N. W., & Ulinuha, R., 2022).

Larangan hijab di Tajikistan diatur secara resmi dalam undang-undang yang melarang mengenakan, mengimpor, menjual, dan mempromosikan pakaian yang dianggap asing bagi budaya nasional. Pemerintah Tajikistan menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan melindungi budaya Tajik dan membatasi pengaruh asing serta ekstremisme

agama (CNN Indonesia, 2024). Namun, kebijakan ini menuai kritik dari kelompok Muslim dan aktivis hak asasi manusia, yang menilai bahwa larangan ini bertentangan dengan hak individu untuk menjalankan keyakinan agamanya tanpa intimidasi atau paksaan (Ramdan, A., 2024). Banyak perempuan Tajikistan dihadapkan pada dilema antara mempertahankan karir atau tetap mengenakan hijab, karena larangan ini diberlakukan secara efektif di sekolah, tempat kerja, bahkan di ruang publik. Sanksi berupa denda besar dan tekanan sosial menyebabkan sebagian perempuan memilih untuk tidak keluar rumah atau membatasi aktivitas di luar.

Dalam dinamika sosial-budaya dan politik, kedua kebijakan wajib hijab di Iran dan pelarangan hijab di Tajikistan menjadi arena konflik sosial-budaya dan politik yang melibatkan perempuan sebagai aktor utama. Di Iran, hijab wajib merupakan simbol kekuasaan negara dan patriarki, sementara di Tajikistan pelarangan hijab menjadi simbol kontrol sekuler atas ekspresi agama. Respons perempuan di kedua negara memperlihatkan perjuangan mempertahankan hak atas tubuh dan identitas mereka dalam konteks tekanan negara yang berbeda. Di Iran, resistensi perempuan menuntut kebebasan memilih dan menolak dominasi patriarki sedangkan di Tajikistan, resistensi muncul sebagai penolakan terhadap pembatasan kebebasan beragama dan ekspresi budaya (Wirayudha, R., 2022).

Pada akhirnya, baik kebijakan wajib hijab di Iran maupun pelarangan hijab di Tajikistan sama-sama memperlihatkan bagaimana negara dapat menggunakan regulasi atas tubuh perempuan sebagai instrumen kontrol sosial dan politik. Perjuangan perempuan di kedua negara ini menjadi bukti bahwa hak atas tubuh, identitas, dan kebebasan berekspresi merupakan isu yang terus diperjuangkan, terlepas dari ideologi negara yang berkuasa (CNN Indonesia, 2024).

Kesimpulan

Dengan demikian, kontrol negara atas tubuh perempuan bukan semata bentuk dominasi gender, melainkan menjadi bentuk konfrontatif negara atas tubuh suatu individu. Hasil analisis data juga memperlihatkan, perempuan menjadi sasaran utama dari kebijakan negara, melalui negara religius seperti Iran dalam penegakan moralitas nilai keislaman, dan sekularisme seperti Tajikistan dalam membentuk identitas nasional dengan menghapus simbol-simbol keagamaan di ruang publik. Perempuan terpaksa untuk menyesuaikan diri dengan pembangunan identitas nasional yang tidak selalu sejalan dengan keyakinan pribadi.

Implikasi dari penelitian ini, dapat menjadi sebuah acuan bagi pembuat kebijakan agar dapat disusun secara transparan dan melibatkan partisipatif dari masyarakat agar kebijakan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, bertujuan untuk tidak menciptakan resiko terjadinya polarisasi, ketidakpuasan publik, dan gerakan resistensi. Pemerintah juga dapat terus memastikan kebijakan yang dibentuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai HAM yang dapat mencederai kebebasan berekspresi suatu individu.

Untuk penelitian selanjutnya, penulis memberikan saran untuk menganalisis lebih dalam kembali literatur dan media online terbaru untuk terus mengikuti perkembangan

dari kebijakan tersebut serta mendapatkan gambaran kelanjutan gerakan perlawanan di kedua negara tersebut. Saran lainnya juga dapat dengan melihat dari sisi sudut pandang yang berbeda untuk memperkaya kajian lebih lanjut.

Daftar Pustaka

- Al Mustofa, S. A., & Kashmir, F. (2024). Dinamika Gerakan Sosial Wanita Iran Pasca Kematian Mahsa Amini. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO*, 4(1), 1-12.
- Amnesty International. (2024, December 10). Iran: UU baru tentang kewajiban mengenakan jilbab meningkatkan penindasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Amnesty.Org. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/12/iran-new-compulsory-veiling-law-intensifies-oppression-of-women-and-girls/>.
- Anjani, R. (2025, March 22). Hijab Dan Rok Mini Dilarang Dipakai di Negara Ini. *detikjabar*. <https://www.detik.com/jabar/berita/d-7834130/hijab-dan-rok-mini-dilarang-dipakai-di-negara-ini>
- Ariesta, M. (2024). Majukan Identitas Sekuler, Alasan Tajikistan Bakal Terapkan Larangan Berhijab. *Medcom.id*. Diakses pada 24 April 2025. <https://www.medcom.id/internasional/asia-pasifik/8KyPoPEk-majukan-identitas-sekuler-alasan-tajikistan-bakal-terapkan-larangan-berhijab>.
- CNN Indonesia. (2024, June 25). Negara Mayoritas Muslim Tajikistan sahkan UU Larang Gunakan hijab. *internasional*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240625101058-113-1113770/negara-mayoritas-muslim-tajikistan-sahkan-uu-larang-gunakan-hijab>.
- CNN Indonesia. (2024, June 26). Alasan Negara Mayoritas Muslim Tajikistan Larang Pemakaian hijab. *internasional*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20240625205330-113-1114099/alasan-negara-mayoritas-muslim-tajikistan-larang-pemakaian-hijab>.
- CNBC Indonesia. (2024, June 30). Negara Muslim ini Mendadak Larang wanita pakai hijab, Ini Alasannya. <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240630075153-4-550504/negara-muslim-ini-mendadak-larang-wanita-pakai-hijab-ini-alasannya>
- detikNews. (2024, June 25). Negara Mayoritas Muslim Ini Larang Hijab, Pelanggar Bakal Kena Denda. *detikjogja*. <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7407744/negara-mayoritas-muslim-ini-larang-hijab-pelanggar-bakal-kena-denda>.
- Eicher, S. (2019). Tajikistan. *Environmental Resources and Constraints in the Former Soviet Republics*. <https://doi.org/10.4324/9780429037344-20>.
- Harahap, N. (2020). Penelitian kualitatif.
- Jabnabillah, F., Aswin, A., & Fahlevi, M. R. (2023). Efektivitas situs web pemerintah sebagai sumber data sekunder bahan ajar perkuliahan statistika. *Sustainable Jurnal Kajian Mutu Pendidikan*, 6(1), 59-70.
- Kahalzadeh, H. (2024). The Islamic Republic of Iran's Chastity and Hijab Law and the Weaponization of Women's Economic Vulnerabilities. *Brandeis University*. Diakses pada 23 April 2025. <https://www.brandeis.edu/crown/publications/middle-east-briefs/meb162.html>.

- Mohammadi, O. (2016). The Personal, the Political, and the Public: Performing Hijab in Iran. *Liminalities*, 12(3).
- Mustaqim, A. H. (2024). 3 Alasan Tajikistan Melarang Hijab, Salah satunya Mewajibkan Penggunaan Pakaian Tradisional. *Sindo News*. Diakses pada 24 April 2025. <https://international.sindonews.com/read/1403865/45/3-alasan-tajikistan-melarang-hijab-salah-satunya-mewajibkan-penggunaan-pakaian-tradisional>.
- Oktavian, Z. M., & Saifuddin, S. (2023). COMPARISON OF THE APPLICATION OF HIJAB BANS IN FRANCE AND HIJAB COMPULSORY IN IRAN AND ACEH, INDONESIA WITH REGARDS TO FREEDOM OF RELIGION PRACTICES. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Kenegaraan*, 7(4), 261-278.
- Permana, F. E., & Zamzami, F. (2024, June 25). 10 fakta seputar larangan hijab di tajikistan, Negeri Mayoritas Muslim | republika online. <https://khazanah.republika.co.id/berita/sfm49f320/10-fakta-seputar-larangan-hijab-di-tajikistan-negeri-mayoritas-muslim>.
- Rahmanda, S. K., & Luthfiana, H. (2024, June 27). 4 fakta tajikistan atur Busana Rakyatnya, Ada Larangan Jilbab, Busana Barat Dan Sendal jepit. *Tempo*. <https://www.tempo.co/gaya-hidup/4-fakta-tajikistan-atur-busana-rakyatnya-ada-larangan-jilbab-busana-barat-dan-sendal-jepit--45435>.
- Ramdan, A. (2024, June 25). Jama'ah Muslimin Kecam Tajikistan Soal Larangan Jilbab – *Minanews.net*. <https://minanews.net/jamaah-muslimin-kecam-tajikistan-soal-larangan-jilbab/>.
- Rashid, A. (2023). The politics of veiling and unveiling. *Feminist Media Studies*, 23(2), 723-728.
- Rony, T. (2022). Protes Hijab: Kondisi Iran Mencekam Pasca-Kematian Mahsa Amini - *Global Liputan6.com*. <https://www.liputan6.com/amp/5078363/protes-hijab-kondisi-iran-mencekam-pasca-kematian-mahsa-amini>.
- Saikal, A. (2020). Iran. Unfulfilled Aspirations. <https://doi.org/10.1093/oso/9780197521885.003.0007>.
- Sihite, E., & Longdong, N. (2022, September 28). Perjalanan Sejarah hijab Di Iran Sebelum Dan Sesudah Revolusi. *Viva.co.id: Berita Terkini Informasi Terbaru Nasional & Internasional*. <https://www.viva.co.id/berita/dunia/1526369-perjalanan-sejarah-hijab-di-iran-sebelum-dan-sesudah-revolusi>
- Todorova, B. (2020). KHOMEINI'S POLITICAL-RELIGIOUS APPROACH OF THE 'IRANIAN NATION'. *Политикологија религије*, 14(1), 39-54.
- United States Department of State. (2011). Tajikistan . Bureau of Democracy, Human Rights and Labor.
- United States Department of State. (2019). Tajikistan 2019 International Religious Freedom Report. Office of International Religious Freedom.
- Usman, U. (2017). ULAMA DALAM KONSTITUSI NEGARA IMAMAH. *Islamuna: Jurnal Studi Islam*, 4(1), 208-231.

-
- Wahyudi, A., & Yulianti, Y. (2021). Studi Komparasi: Motivasi Belajar Siswa Pada Pembelajaran Daring dan Luring di UPT SDN X Gresik. *Jurnal BASICEDU: Journal of Elementary Education*, 5(5), 4292-4298.
- Wijayanto, N. W., & Ulinnuha, R. (2022). Resistensi Perempuan Iran Terhadap Kebijakan Wajib Berhijab Pada Era Hassan Rouhani. *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, 21(2), 171-186.
- Wirayudha, R. (2022, September 29). Prahara hijab Di Tanah Persia. *Historia.ID*. <https://www.historia.id/article/prahara-hijab-di-tanah-persia-drrqe>.
- Yulianingsih, T. (2024). Ini Alasan Tajikistan Negara Mayoritas Muslim Larang Hijab dengan Denda Hingga Rp88 Juta. *Liputan 6*. Diakses pada 24 April 2025. <https://www.liputan6.com/global/read/5627870/ini-alasan-tajikistan-negara-majoritas-muslim-larang-hijab-dengan-denda-hingga-rp88-juta>.